UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN * UNIKOM *

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang disajikan dalam babIII ternyata pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah kota Sukabumi telah berjalan dengan baik, kesimpulan tersebut didukung dengan adanya hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan pajak reklame :

1. Bahwa ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh DIPENDA kota Sukabumi sesuai dengan ketentuan umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, dan tarif pajak reklame yang ditetapkan oleh DIPENDA kota Sukabumi telah dilaksanakan dengan benar yaitu sesuai dengan peraturan daerah yang menetapkan tarif pajak setinggi-tingginya 25% serta tata cara pelaksanaan yang dilakukan DIPENDA kota Sukabumi telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan daerah No. 03 Tahun 1998.
2. Perkembangan pemungutan pajak reklame tahun anggaran 2001/2002 di kota Sukabumi mengalami perkembangan yang cukup meningkat, sekalipun presentasenya cukup kecil jika dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainya. Hal ini dapat dilihat dari angka yang tercantum dalam laporan harian realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2001 periode 29-09-2001 sebesar Rp 88.332.702,92 dari yang dianggarkan sabesar Rp 96.800.000,00.

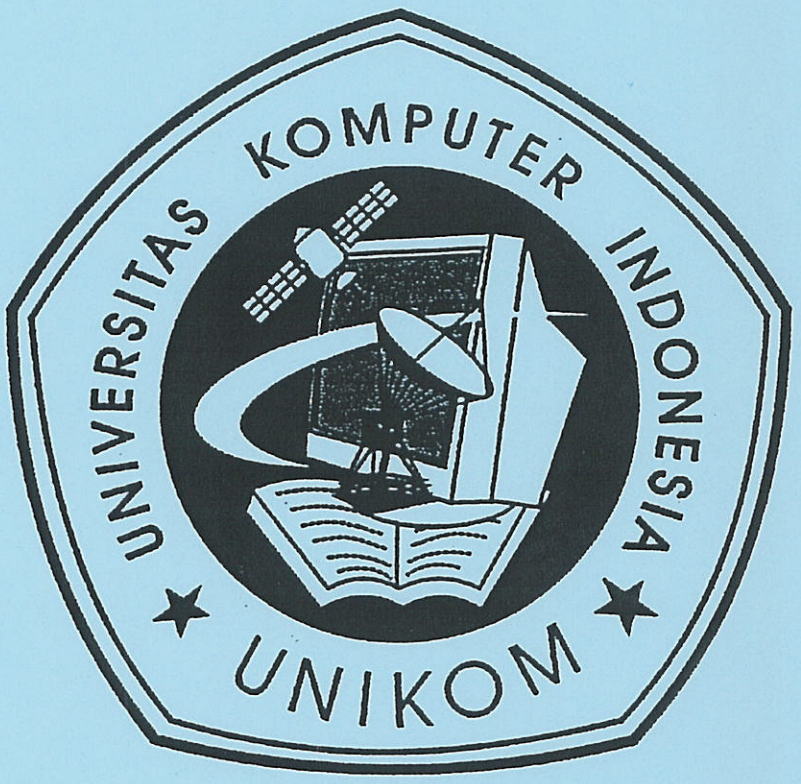
3. Peranan pajak reklame dalam meningkatkan pajak daerah relatif sangat kecil, presentasenya tidak seimbang dibandingkan dengan peningkatan pajak daerah lainnya yang lebih besar.

4.2 Saran

Dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Saran penulis:

1. Tingkatkan pelaksanaan mengenai ketentuan umum, penetapan tarif, dan tata cara kerja yang selama ini telah dilakukan oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Sukabumi agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Agar meningkatnya pendapatan pajak reklame, maka hendaknya DIPENDA Sukabumi mengadakan pemeriksaan terhadap reklame-reklame yang dipasang di pinggir jalan dikarenakan banyaknya reklame yang dipasang tanpa seijin dari Dinas Pendapatan Daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak reklame.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM